

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan
pada Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan

Oleh :

ELIDA MURNI
06096010



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2009**





No. Alumni Universitas	Elida Murni	No. Alumni Fakultas
------------------------	-------------	---------------------

a). Tempat/Tgl.lahir: Batuhampar, 31/03/1987 b). Nama Orang Tua: Syahril (Alm) dan Arnis. Fakultas: Politeknik d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NBP: 06096010 f). Tgl.Lulus: 02 November 2009 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: i) Lama Studi : 3 tahun k) Alamat orang tua: Batuhampar, Kecamatan Akabiluru ,Kabupaten Limapuluh Kota

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Tugas Akhir DIV oleh Elida Murni.
Pembimbing 1.Ulfi Maryati, SE. M.Ak. Ak 2. Endrawati, SE, M.Kom. Ak

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data PDRB atas harga konstan, realisasi PAD, DAU dan DAK kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, yang terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat dalam Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2004, 2005 dan 2006. Analisis data dengan menggunakan analisa regresi berganda. Hasil analisis membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 02 November 2009.

Abstrak telah disetujui oleh penguji:
Penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Ferdawati, SE. M.Sc. Ak	Amy Fontanella, SE. Ak	Gustati, SE. Ak	Ulfi Maryati, SE. M.Ak. Ak

Pembimbing:

Mengetahui:
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE. MM. Ak
Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip seluas-luasnya, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (UU No. 32 Th. 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 169). Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi, peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Susanti dkk, 2000: 23). Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari produk domestik regional bruto per kapitanya (Djoyohadikusumo, 1994:1). PDRB dalam statistik disajikan dalam dua penilaian, yaitu atas harga berlaku (*at current market*) yaitu PDRB yang memasukkan faktor inflasi di dalamnya dan atas dasar harga konstan (*at constant market price*) yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Berarti untuk melihat kenaikan pendapatan yang riil adalah PDRB atas harga konstan (PDRB Kabupaten dan Kota Sumatera Barat, 2005).

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan rentang tahun pengambilan data hanya tahun 2004 sampai tahun 2006 dan tidak mengambil tahun terbaru disebabkan karena keterbatasan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.
2. Variabel yang diteliti hanya menggunakan tiga variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Priyo Hari dan Harianto, David. "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita". Dalam Simposium Nasional Akuntansi X Makasar. 2007.
- Ahman, Eeng. (2001). *Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2001). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*, Edisi I. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. (2002). *Aplikasi Analisis multivariate dengan Program SPSS*, Edisi II. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2005-2007, BPS Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
- Mardialis. (2008). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maulida, Novi Pratiwi, (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Muhidin, Ali dan Abdurrahman, Maman. *Analisa Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia Bandung
- Mukhlis. (2003). "Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pembangunan Dan Pertumbuhan Tingkat Pengerjaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sumbawa". Universitas Gajah Mada.
- Nachrowi, Nachrowi D dan Usman, Hardius. "*Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*" Lembaga Penerbit FEUI, 2006.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah.